KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RENCANA AKSI KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023

Jl. Akasia No. 02 TELP. (0768) 21071 Fax (0768) 22573

Website : http://bappeda.inhilkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasara strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.

Tembilahan, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Sistematika Penulisan 2

BAB II RENCANA AKSI 3

2.1 Rencana Strategis 3

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 4

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 6

2.4 Rencana Aksi 9

BAB III PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 5

TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 6

TABEL 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 7

TABEL 2.4 Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 ini memiliki peran yangsangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah

tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara berkala;
b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 SISTEMAKTIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Rencana Aksi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi.
Bab III Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi

BAB II
RENCANA AKSI

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untukmencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengampu visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

Visi :

Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat.

Misi :

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif Dan Berketaatan Hukum.

Tujuan :

Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.

Sasaran :

Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.
2. Mengembangkan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil

Sasaran :

1. Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.
2. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya tata kelola Organisasi Bappeda yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang akan digunakan untuk tahun 2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.10/BAPPEDA-Set/I/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.	1.1 Persentase Indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	**Formulasi :** $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Daerah Dalam RPJMD yang Mencapai Target} \geq 76\%}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Daerah Dalam RPJMD}} \times 100\ \%$	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah Melalui Pemanfaatan Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	2.1 Persentase Produk Inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	**Formulasi :** $\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi Daerah Hasil dari Kelitbangan yang Implementasikan}}{\text{Jumlah Produk Inovasi Daerah Hasil Dari Kelitbangan}} \times 100\ \%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil.	3.1 Nilai Evaluasi RB Bappeda atas Komponen Pengungkit	**Penjelasan :** Nilai hasil evaluasi RB dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		3.2 Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**Penjelasan :** Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	**Penjelasan :** Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Inhil

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mereprensentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

N0	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.	1.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %.	Persen	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	1.	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan.	Persen	100
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil.	1.	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Nilai	28.00
		2.	Nilai AKIP Bappeda	Prediket	BB (70.05)
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks	100

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.	1. Persentase Indikator Kinerja Sasaran daerah Dalam RPJMD Yang mencapai Target ≥ 76%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1/5	1.377.874.150
					- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		528.929.250
					- Pelaksanaan Konsultasi Publik		46.139.850
					- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah		3.800.000
					- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		153.358.000
					- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		645.647.050
					2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1/1	105.716.900
					- Pembinaandan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		105.716.900
					3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah	1/2	203.622.000
					- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		69.860.000
					- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		133.762.000
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1/6	1.090.916.600
					- KoordinasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD		170.626.250
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		141.495.700
					- Koordinasi Pelaksanaan Sinerginitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		167.473.600
					- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		165.641.750
					- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		208.386.000

					Bidang Pembangunan Manusia - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi		237.293.300
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1/2 1/2	1.101.660.506 571.187.301 530.473.205 801.797.000 513.820.300 287.976.700
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan. Pembangunan Daerah	1. Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan - Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan 2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	1/3 1/3	458.506.610 131.103.350 147.459.980 179.943.280 543.231.150 177.648.400 162.927.900 202.654.850
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan. Daerah Kab. Inhil	1. Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit 2. Nilai AKIP Bappeda 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	28 70.05 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1/2	71.729.050 46.437.800 25.291.250

2.4 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 2.4

Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN	TARGET TRIWULAN				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN				KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN				RENCANA AKSI/ AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN (RP.)	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4			1	2	3	4				1	2	3	4			1	2	3	4		
1	2	3	4	5				6	7	8				9	10	11	12				13	14	15				16	17
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	1. Persentase Indikator Kinerja Sasaran daerah Dalam RPJMD Yang mencapai Target ≥ 76%	100	-	-	-	100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD	-	-	-	100	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	-	-	-	3		1.377.874.150	508.149.150	476.116.750	256.025.500	137.582.750		
														- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	-	1	1	-		528.929.250	142.069.250	273.660.000	56.600.000	56.600.000		
																					- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.400.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000		
																					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	730.000	730.000	-	-	-		
																					- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.651.250	13.091.250	24.560.000	-	-		
																					- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	-	20.000.000	-	-		
																					- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000	-	6.000.000	-	-		
																					- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000	6.000.000	-	-	-		
																					- Belanja Jasa Tenaga Ahli	211.500.000	-	211.500.000	-	-		
																					- Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	-	-		

| | | |

															-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	-	-	-		**153.358.000**	**123.358.000**	**30.000.000**	-	-		
																						-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.060.000	1.060.000	-	-	-		
																						-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.650.000	10.650.000	-	-	-		
																						-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.000.000	47.000.000	-	-	-		
																						-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	2.000.000	-	-	-		
																						-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.850.000	9.850.000	-	-	-		
																						-	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.500.000	2.500.000	-	-	-		
																						-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.100.000	3.100.000	-	-	-		
																						-	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.000.000	1.000.000	-	-	-		
																						-	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.300.000	2.300.000	-	-	-		
																						-	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.000.000	1.000.000	-	-	-		
																						-	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000	1.000.000	-	-	-		
																						-	Belanja Sewa Hotel	2.000.000	2.000.000	-	-	-	**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
																						-	Belanja Sewa Audio Visual	3.500.000	3.500.000	-	-	-		
																						-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.398.000	36.398.000	30.000.000	-	-		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

														-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	-	-	-	1		167.473.600	47.100.600	104.309.500	7.805.000	8.258.500		
																					-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.400.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
																					-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.259.600	1.060.600	1.054.000	1.105.000	1.040.000		
																					-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	236.000	-	77.500	-	158.500		
																					-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	100.000	-	100.000		
																					-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.720.000	940.000	1.320.000	1.600.000	1.860.000		
																					-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.950.000	-	2.950.000	-	-		
																					-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000	-	48.000.000	-	-		
																					-	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	500.000	-	500.000	-	-	**Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia**	
																					-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.208.000	40.000.000	45.208.000	-	-		
														-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	1	1	1		165.641.750	54.124.400	64.911.350	41.181.000	5.425.000		
																					-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		

| | | |

| | | |

- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.400.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.476.600	2.635.700	741.600	2.099.300	-	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.406.901	145.000	137.500	-	2.124.401	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	350.000	-	-	-	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.908.000	2.000.000	1.800.000	1.400.000	9.708.000	
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.250.000	-	-	-	16.250.000	
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.135.000	-	-	-	59.135.000	
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.500.000	-	66.500.000	-	-	
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	7.200	7.200	7.200	7.200	
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.600.000	-	3.600.000	-		**Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- Belanja Sewa Hotel	4.500.000	-	4.500.000	-		
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	357.796.000	150.000.000	100.000.000	80.000.000	27.796.000	

| | | |

| | | |

																								- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.400.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000		
																								- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.754.200	1.786.800	978.000	528.900	460.500		
																								- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	426.500	121.500	225.000	80.000	-		
																								- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	1.760.000	480.000	320.000	320.000		
																								- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.600.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000		
																								- Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	-		
																								- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	213.916.000	53.479.000	53.479.000	53.479.000	53.479.000		
2	**Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.**	**1**	**Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan.**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**-**	**-**	**-**	**90**	**1**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola**		**-**	**-**	**-**	**90**		**458.506.610**	**96.772.950**	**126.729.700**	**118.769.060**	**116.234.900**		
																- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	-	-	-	1		131.103.350	31.260.450	41.325.000	14.743.900	43.774.000		
																								- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		
																								- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.413.350	2.205.450	-	1.943.900	264.000		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

																						- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	300.000	-			
																						- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	-	-	-	3.000.000	
																						- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44.880.000	-	14.260.000	14.860.000	15.760.000	
																						- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.254.000	13.265.000	19.775.000	22.678.760	58.535.240	
3	**Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil.**	1	**Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit**	**28.00**	-	-	-	**28**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	-	-	-	**100**	1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar**	**Dokumen**	**4**	**1**	**1**	**2**		**71.729.050**	**25.160.450**	**15.666.200**	**14.563.200**	**16.339.200**	**Sekretariat**
		2	**Nilai AKIP Bappeda**	**70.05**	-	-	-	**70.05**								- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	1	1		46.437.800	15.456.200	10.816.200	8.676.200	11.489.200	
																						- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.200.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
		3	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	**100**	-	-	-	**100**														- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.813.000	-	-	-	2.813.000	
																						- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.960.000	4.640.000	-	1.160.000	1.160.000	
																						- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
																						- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000	3.300.000	3.300.000	-	-	
																						- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
																						- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	7.200	7.200	7.200	7.200	

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

											- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.100.000	-	1.100.000	-	-	
											- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.000	-	680.000	-	-	
											- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.000.000	-	68.000.000	-	-	
					6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	-	**364.184.500**	**91.285.554**	**91.485.554**	**90.706.696**	**90.706.696**	
						- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	-	-		6.000.000	1.700.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	
													- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000	1.700.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	
						- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	-	48		208.320.000	52.119.429	52.119.429	52.040.571	52.040.571	
													- Belanja Tagihan Telepon	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
													- Belanja Tagihan Air	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
													- Belanja Tagihan Listrik	132.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	
													- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.600.000	15.939.429	15.939.429	15.860.571	15.860.571	
						- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	46		149.864.500	37.466.125	37.466.125	37.466.125	37.466.125	
													- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.881.300	6.720.325	6.720.325	6.720.325	6.720.325	
													- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

| | | |

| | | |

																								-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000	1.250.000	-	2.000.000	1.750.000		
																								-	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000	5.040.000	8.490.000	5.000.000	5.470.000		
																								-	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.000.000	826.000	9.637.500	8.000.000	5.536.500		
																								-	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	70.000.000	-	70.000.000	-	-		

Tembilahan, 29 Desember 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,

Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111301992031002

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapain kinerja tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai penduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, serta sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat dilihat mengantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apanya yang telah ditargetkan.

Tembilahan, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002